

KEMANDIRIAN PEREMPUAN DALAM MENGELOLA REMITAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH PROGRAM GRAMEEN BANK

**Iskandar Dzulkarnain, Faidol,
Aminah Dewi Rahmawati, H. Mohammad Djasuli**
Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan
Email: iskandar_aftoinette@yahoo.co.id

Abstrak:

Banyaknya suami yang bekerja sebagai nelayan dengan ketidakpastian waktu melautnya, pada akhirnya memperbanyak keluarga nelayan masuk ke dalam kategori miskin, yang pada akhirnya menyebabkan istri-istri bekerja ke luar daerah, bahkan ke luar negeri. Hal inilah yang menguatkan peran istri bekerja dalam dua ranah, yaitu ranah domestik dan publik. Realitas hidup secara ekonomi dan sosial yang mengharuskan mereka menerjang budaya Madura. Meskipun demikian, secara tidak langsung dan otomatis, kemandirian perempuan akan menghapuskan mereka dari sikap ketidakadilan para suaminya, keluarganya, dan masyarakat Madura. Dari sinilah peneliti berupaya untuk memberdayakan kaum perempuan pesisir Madura untuk tidak hanya sekedar mandiri secara ekonomi dan sosial, namun kemandirian tersebut dibarengi dengan keadilan gender bagi mereka. Karenananya, peneliti berargumen bahwa perlu adanya pemberdayaan bagi kaum perempuan melalui penguatan ekonomi, yang akan melahirkan kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan religiusitas mereka melalui pola *Grameen Bank* di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS), dengan program dana remitan. Hal ini penting dikarenakan pengelolaan keuangan remitan yang tidak bagus disebabkan oleh belum beranjaknya para keluarga yang istrinya bekerja ke luar negeri ke strata sosial yang lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan daerah Kabupaten Malang Selatan, tepatnya di desa Kedungsalam kecamatan Donomulyo, di mana para keluarga yang ditinggalkan istrinya bekerja ke luar negeri lebih mandiri secara ekonomi, sosial, budaya, dan religiusitasnya serta mampu menaikkan strata sosial ekonomi keluarganya.

Abstract:

Many husbands were fishermen with their fishing time of uncertainty, in turn reproduce fishing families in the category of the poor, which in turn led to the wives work outside the region and even abroad. This is what strengthens the role of the wife works in two spheres, domestic and public. And economic realities of life that requires them crashing socially Madura culture. Even so, indirectly, the independence of women would automatically eliminate them from the injustice of her attitude, her family, and the Madura. From this the researcher seeks to empower women to Madura coast not only economically and socially independent, but independence is coupled with gender justice for them. So the researchers argue that the need for the empowerment of women through economic strengthening, which will give birth to the independence of women in the economic, social, cultural, and their religiosity through

a pattern of Grameen Bank in Sharia Microfinance Institutions (LKMS), the remittance of funds program. This is important because the financial management of remittances is not good, because the family has not move whose wife works abroad to the higher social strata. This is in contrast to the South Malang regency, namely Kedungsalam village sub Donomulyo, where the family left behind his wife worked abroad more economic independence, social, cultural, and religiosity and were able to raise her family socio economic strata.

Kata kunci:

Remitan, *Grameen Bank*, kemandirian perempuan, dan LKMS

Pendahuluan

Secara tradisional, pola keluarga patriarkhi menempatkan istri sebagai pihak yang mengurus pekerjaan domestik. Sistem patriarkhi dalam sejarah gender merupakan sistem yang menempatkan kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam segala aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi, segenap manajemen senantiasa menggantungkan perusahaan keberlangsungan keluarga kepada laki-laki (suami), sementara perempuan (istri) menempatkan diri pada penerimaan serta pembelanjaan keluarga. Perempuan dianggap sebagai bagian penting dari faktor domestik, sedangkan laki-laki (suami) ditempatkan pada posisi publik. Peranan domestik perempuan adalah peranan sosial yang terkait dengan aktifitas internal rumah tangga, seperti memasak, mengurus anak, dan melayani suami, sedangkan peranan publik adalah peranan sosial yang berkaitan dengan aktifitas sosial, ekonomi, dan politik di luar rumah tangga. Jika peranan tersebut dapat dilakukan oleh seorang perempuan, maka dia memainkan peranan ganda. Peranan ganda perempuan semacam itulah dapat dilihat dalam aktifitas komunitas masyarakat pesisir Madura dan perempuan Kabupaten Malang Selatan. Peranan ganda tersebut meru-

pakan akibat dari kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat pesisir yang merupakan lagu lama yang tidak dapat dielakkan pada sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia hingga bergulirnya era reformasi. Semestinya, bangsa ini berbangga diri memiliki masyarakat yang rela mencurahkan hidup dan matinya untuk mengelola sumber daya kemaritiman. Mengingat pembangunan kemaritiman bagi bangsa ini merupakan modal besar dan peluang lebar untuk menuju persaingan ekonomi global. Memberdayakan masyarakat pesisir dari kemiskinan dan keterbelakangan adalah langkah yang sangat mendasar dalam tahap awal pembangunan kemaritiman.

Ada beberapa hal yang menghambat pemberdayaan terhadap perempuan pesisir, yaitu: *pertama*, tingkat pendidikan penduduk yang rendah. *Kedua*, kepemilikan perahu dan alat tangkap yang masih sederhana. *Ketiga*, teknis proses produksi sederhana dan tergantung pada musim. *Keempat*, harga hasil tangkapan ikan yang masih rendah pada saat panen dan tata niaga yang dikuasai pengumpul. *Kelima*, rendahnya pengetahuan perempuan pesisir terhadap lembaga-lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang ada, khususnya pola pengelolaan *grameen bank* yang

diakibatkan oleh rendahnya sosialisasi tentang pola pengelolaan keuangan tersebut, baik oleh ilmuwan maupun Pemkab.

Grameen Bank adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan *collateral*. Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Yang berbeda dari kredit ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin. Pola *grameen bank* ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara di dunia (kebanyakan di negara Asia dan Afrika, termasuk Indonesia). Jika diterapkan dengan konsisten, pola *grameen bank* ini dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin melalui perempuan.

Keterlibatan perempuan pada wilayah publik dalam keluarga pesisir tidak hanya bermanfaat bagi kelangsungan hidup rumah tangga, peningkatan kapasitas diri, dan status sosial dalam struktur sosial masyarakatnya, tetapi memberi kontribusi terhadap dinamika sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Karena itu, kaum perempuan (istri) tidak hanya menjadi potensi sosial budaya, akan tetapi juga sangat potensial dalam pengembangan ekonomi.

Dalam konteks ini, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemandirian perempuan dalam melakukan pola pengelolaan dana remitan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) berpola *Grameen Bank*? Sehingga signifikansi penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, setelah memperoleh data lengkap terkait

pemberdayaan masyarakat kaum perempuan pesisir (istri nelayan) terhadap penguatan ekonomi melalui pengelolaan lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) berpola *Grameen Bank* dapat digunakan sebagai upaya untuk mengungkap pengelolaan peran perempuan dalam wilayah publik. *Kedua*, wilayah pesisiran merupakan wilayah publik yang terbagi menjadi dua, yaitu laut dan darat. Karena itu, temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritik dalam mengurai upaya pemberdayaan perempuan nelayan melalui penguatan ekonomi tersebut, yaitu merumuskan *gender assignment* dan *gender equality* melalui pengelolaan lembaga keuangan mikro syari'ah (LKMS) pola *Grameen Bank* melalui dana remitan.

Sedangkan secara kultural, penelitian ini urgen dilakukan sebagai kajian keilmuan di bidang sosial, budaya, dan gender di Indonesia, khususnya komunitas keluarga pesisir masyarakat Madura. Pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang peran perempuan dan keharmonisan relasi suami-istri keluarga pesisiran sangat berguna bagi pengembangan masyarakat Muslim yang inklusif, yaitu masyarakat yang mampu menghargai peran perempuan di wilayah publik yang memiliki nilai positif sama besar dengan kaum lelaki.

Sebagian masyarakat Madura hidup di daerah pesisir. Masyarakat pesisir merupakan salah satu komunitas sosial yang kelangsungan hidupnya ditopang oleh kemampuannya mengelola sumber daya laut. Karena tantangan di laut yang begitu besar, sudah menjadi gejala umum jika istri nelayan harus bekerja di sektor publik (daratan) guna menunjang pekerjaan suami di laut.

Kegiatan melaut memakan waktu yang beragam, dari yang hanya

menghabiskan waktu 24 jam, 15 hari sampai 1 bulan. Pada saat suami melaut, istri-istri nelayan mengambil alih semua urusan keluarga, baik pekerjaan domestiknya sendiri maupun kegiatan publik suaminya. Segenap pola pengaturan peran menjadi bagian penting dalam relasi suami istri. Dalam konteks ini, terjadi dinamika dan pola peran yang menarik antara suami (nelayan) dan istri yang mengambil inisiatif untuk memerankan diri sebagai bagian dari peran yang selama ini “ditabukan” dalam masyarakat Madura, yakni sektor publik. Bahkan, pada saat suami mereka datang, istri-istri nelayan harus sudah siap di darat menyambut kedatangan mereka untuk menjual hasil tangkapan suami mereka dari laut. Realitas ini mengharuskan istri merambah dua peran sekaligus, yaitu peran domestik dan publik.

Peran ini akan semakin besar seiring semakin banyaknya istri-istri nelayan yang beralih bekerja ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri akibat minimnya hasil tangkapan suami-suami mereka, yang diakibatkan perahu dan alat tangkapnya yang masih sederhana. Selain itu, ia juga diakibatkan oleh banyaknya utang yang mereka tanggung selama masa paceklik ikan.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang ingin dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir di Kepulauan Arjasa, Kangean, Sapeken, dan Ra'as Sumenep Madura adalah melalui pemberdayaan masyarakat yaitu perkuatan pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berbasis sumber daya dan budaya lokal. Di samping itu, perlu juga dilakukan penguatan kelembagaan lokal untuk menyokong upaya penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, juga perlu dicarikan perbandingan pola pengelola-

an keuangan remitan yang lebih baik, sehingga dapat mengangkat strata sosial keluarganya. Dalam hal ini, peneliti melihat dan mengkaji bahwa daerah Kabupaten Malang, tepatnya Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo, para keluarga (TKI) yang ditinggalkan istrinya bekerja ke luar negeri relatif lebih mandiri dan mampu mengelola uang kiriman istrinya (remitan) dengan baik, sehingga mampu mengangkat strata sosial keluarganya ke arah yang lebih baik.

Hal-hal yang menyebabkan penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan adalah:

1. Tingkat kesejahteraan penduduk pesisir Kepulauan Arjasa, Kangean, Sapeken, dan Raas Sumenep Madura sangat rendah, terutama perempuan yang ditinggalkan suaminya bekerja ke luar negeri .
2. Proporsi penghasilan yang diterima rumah tangga sebagian besar digunakan untuk makan sebesar 51%. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk pendidikan sebesar 19%, utilitas sehari-hari sebesar 21%, aktivitas sosial sebesar 4%, dan untuk kegiatan produktif sebesar 5%, sehingga masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usahanya. Bahkan mereka banyak terjebak dengan “rentenir”. Oleh karena itu, mereka perlu dukungan dana untuk mengembangkan usahanya, dengan memanfaatkan sumber dana yang ada yakni remitan.
3. Tingkat pendidikan penduduk sangat rendah. Masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan sampai di atas SLTP hanya sebesar 9%, sedangkan sisanya sebesar 61% tidak bersekolah, sebesar 14% tidak tamat

SD dan sebesar 16% tamat SD. Implikasinya mereka sulit untuk beralih ke jenis pekerjaan lain di luar sektor melaut (nelayan) karena pengetahuan dan keterampilan mereka sangat rendah. Sehingga banyak dari mereka yang menjadi buruh di luar negeri.

4. Wawasan masyarakat tentang organisasi dan kelembagaan sangat rendah. Mereka hanya mengetahui lembaga keagamaan yang sering diikuti melalui kelompok pengajian. Hal ini menandakan bahwa masyarakatnya memang agamis. Masyarakat pesisir di Kabupaten Sumenep Kepulauan Arjasa, Kangean, Sapeken, dan Raas kebingungan mencari kegiatan usaha lain di luar musim paceklik ikan untuk menunjang kebutuhan pokok keluarga yang disebabkan terbatasnya modal yang dimiliki dan *skill* yang rendah.
5. Produksi ikan yang melimpah, kadang tidak mudah terjual, kalau pun bisa dijual seringkali di bawah harga dasar dan nelayan tidak memiliki posisi tawar-menawar, sehingga nelayan semakin terpuruk dan semakin miskin.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimulai dari wacana tentang gender yang merupakan kajian yang menarik dan kontroversial. Dari segi tekstual, Nasaruddin Umar dalam bukunya *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*,¹ menggambarkan tentang persoalan gender dalam al-Qur'an, sehingga didapat bahwa di dalam al-Qur'an terdapat perbedaan kosa kata tentang seks

dan gender. Seks mengacu kepada kata *al-dzakar* dan *al-untsâ*, sedangkan untuk gender kata yang sering digunakan di dalam al-Qur'an adalah *al-rajul* dan *al-mar'ah*. Al-Qur'an bahkan menegaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki, seperti hak memelihara identitas diri, hak memperoleh pendidikan, hak berpartisipasi dalam politik, dan persoalan publik lainnya.

Secara kontekstual sosial-empirik, penelitian tentang gender terutama tentang kemandirian perempuan dan ketidakadilan gender, menurut hemat penulis belum ada yang melakukannya secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan para peneliti, penulis, dan akademisi masih beranggapan bahwa ketika perempuan mandiri secara sosial dan ekonomi maka ketidakadilan tidak akan menimpa mereka. Seperti yang ditulis oleh Arief Budiman dalam *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*,² yang beranggapan bahwa perlu adanya pembagian kerja yang kemudian akan menjadikan para wanita lebih mandiri secara ekonomi. Selain itu, Kathryn Woodward³ mengatakan bahwa ada indikasi yang berubah bagi para perempuan (ibu) pada masa budaya kontemporer sekarang ini. Ia mencatat kemunculan suatu representasi baru, yakni "ibu yang mandiri" yang bukan lagi merupakan figur domestik ideal yang hanya berkulat hanya dengan pengasuhan anak, akan tetapi juga

¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999)

² Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1981)

³ Kathryn Woodward, "Motherhood: Identities, Meanings and Myths" dalam Kathryn Woodward (ed.), *Identity and Difference: Culture, Media, and Identities* (London: Sage, 1997)

mendukung otonomi dan kerja bagi ibu. Hal ini tidak lepas dari fantasi menjadi ibu yang sekaligus memiliki karier dan bisa mengeksplorasi individualitasnya sehingga dapat tampil secara menarik.

Sedangkan kajian tentang ketidakadilan gender telah dilakukan dengan sangat baik oleh Mansur Faqih.⁴ Ia mengklasifikasikan ketidakadilan yang menimpa para perempuan menjadi lima bagian, *pertama*, gender dan marginalisasi perempuan; *kedua*, gender dan subordinasi; *ketiga*, gender dan stereotipe; *keempat*, gender dan kekerasan; dan *kelima*, gender dan beban kerja.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kualitatif dan kuantitatif untuk membuat *brandmark* dengan teknik (a) *Social Auditing (Examining Local Currency System)*, (b) *Economic Auditing*, (c) *Community and Resources Mapping* dan Teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*).

Penelitian ini berlangsung selama satu tahun, dengan lokasi di desa-desa yang banyak menyumbang warganya bekerja ke luar negeri di Kabupaten Sumenep, yaitu Kecamatan Sapeken, Arjasa, Kangayan dan Raas, serta Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang daerah Selatan sebagai pembanding. Adapun responden diambil 10% dari KK TKI untuk setiap desa.

Potret Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Malang dan Sumenep

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

Migrasi di Indonesia bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru, karena kondisi geografis Indonesia yang sangat luas menunjang akan hal itu. Berbeda dengan latar belakang migrasi yang terjadi pada akhir abad XX, menurut Tjondronegoro dalam Syafa'at⁵ sangat terkait dengan kegagalan pembangunan pedesaan pertanian, sehingga menciptakan pemerataan kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan yang semakin sedikit bagi warganya, serta kondisi ini semakin nampak ketika Indonesia dilanda krisis moneter di awal tahun 1997-an sampai saat ini, yang pada akhirnya menciptakan jatuhnya era Orde Baru Soeharto dan semakin sulitnya masyarakat mempercayai pimpinan-pimpinan negaranya.

Menurut Rahayu,⁶ untuk menjadi migran dibutuhkan beberapa persyaratan administratif dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Persyaratan administratif tersebut di antaranya adalah:

- a. Usia minimal 18 tahun kecuali negara tujuan menentukan lain
- b. Pendidikan disesuaikan dengan negara tujuan, minimal SLTA
- c. Kartu tanda penduduk (KTP)
- d. Kartu susunan keluarga (KK)
- e. Surat izin orang tua/wali/suami/istri diketahui oleh Kepala Desa
- f. Akte kelahiran/surat kenal lahir.
- g. Keterampilan sesuai dengan jabatan

⁵ Syafa'at, et.al, *Menggagas Kebijakan Pro TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar* (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002), hlm. 2

⁶ Devi Rahayu, *Trafficking Buruh Migran* (Sidoarjo: Qithos Digital Press, 2007), hlm. 4-10

- h. Kartu Kuning (AKI) dari Depnakertrans
- i. Kartu identitas TKI (KITKI) dari Depnakertrans setempat
- j. Ijazah pendidikan, dan surat keterangan sehat.

Sedangkan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh para calon migran adalah paspor, visa kerja dari negara tujuan, pengurusan tiket, tanda tangan perjanjian kerja, asuransi perlindungan TKI, program kepersertaan tabungan TKI, dan rekomendasi bebas viskal luar.

Lebih lanjut, Syafa'at dkk⁷ membagi proses bermigrasi menjadi 6 (enam), yakni: (1) rekrutmen; (2) penampungan; (3) pemberangkatan; (4) saat di negara tujuan; (5) pemulangan dan (6) pengelolaan hasil. Pembagian ini berdasarkan perspektif kebijakan pemerintah daerah. Namun demikian 6 (enam) tahapan ini dapat disederhanakan menjadi 3 tahapan yaitu: (a) sebelum berangkat (*pre-recruiting*); (b) saat di negara tujuan (*destination*); dan (c) saat kembali di keluarganya (*reintegration*). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) dan (2) yang mengemukakan tentang perlindungan terhadap TKI dari keseluruhan proses, mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.⁸

Dalam proses bermigrasi banyak sekali masalah yang dialami oleh para TKI, terutama para TKI perempuan. Kasus-kasus yang terjadi antara lain: gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang

panjang, pemotongan gaji, larangan berkomunikasi, larangan ke luar rumah, penganiayaan, pelecehan seksual, pemulangan tanpa kesalahan, dan masih banyak lagi. Tapi di antara masalah-masalah tersebut, masalah biaya rekrutmen yang tinggi dengan pemotongan gaji pada awal para TKI bekerja merupakan hal yang sangat penting, karena biaya tinggi sangat merugikan para TKI, terutama TKI perempuan, dan ini yang banyak dialami oleh para TKW di Desa Kedungsalam Donomulyo Kabupaten Malang maupun di kepulauan Sumenep. Selain itu, asuransi bagi para TKI merupakan masalah berikutnya, demikian pula Terminal 3 yang selalu dilewati oleh para migran pada saat berangkat maupun pulang. Persoalan terakhir adalah masalah penggunaan remitan.

Sebenarnya ketidakadilan terhadap TKW dapat terjadi pada setiap ranah kehidupan yang mereka lalui. Dalam kehidupan TKW, setidaknya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu [1] pengalamannya pada saat sebelum keberangkatan menjadi buruh migran (*pre-departure*), [2] pengalaman pada saat berada di luar negeri atau tempat bekerja (*post arrival*), dan [3] pengalamannya pada saat setelah kembali ke tanah air atau masa kepulangan (*reintegrasi*).⁹

Ketidakadilan ini terjadi dalam bentuk-bentuk mengeksploitasi perempuan, mensubordinasi perempuan, sampai dengan menstereotipkan buruh migran perempuan dengan label-label negatif. Pelemahan juga erat kaitannya dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dapat mendominasi dan menghancurkan keinginan serta inisiatif perempuan. Kekuasaan terkait dengan konteks

⁷ Syafa'at, et.al, *Menggagas Kebijakan*, hlm. 137

⁸ Ummi Hilmy, et al, "Akses dan Kontrol pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)", Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan: Dian Mutiara Crisis Centre, 2008.

⁹ Ibid.

lingkungan TKW, nilai-nilai budaya di mana TKW hidup, orang-orang di sekitar TKW, sampai dengan hal-hal yang sifatnya sangat makro seperti peraturan-peraturan negara terkait proses migrasi, kebijakan-kebijakan negara, aparat pemerintahan lokal dan nasional.

Pembahasan mengenai perempuan bisa diteropong dari berbagai sudut pandang. Boleh jadi orang memandang dari sudut ciri-cirinya, perannya dalam masyarakat, dalam keluarga, pekerjaannya, karakteristiknya, dan lain sebagainya. Dalam pandangan sejarah, perempuan telah memainkan banyak peran, baik sebagai ibu, istri, buruh, pekerja sukarela, bahkan bapak, dan lain sebagainya. Bahkan lebih lanjut, tidak hanya peran tunggal, banyak perempuan yang telah memainkan peran ganda.

Tiap masyarakat mengembangkan citra tertentu mengenai peranan yang tepat bagi perempuan. Beberapa komunitas masyarakat memberikan kedudukan yang terhormat bagi perempuan. Beberapa yang lain menganggap peran perempuan kurang penting dibandingkan dengan laki-laki. Beberapa citra tentang perempuan bahkan seringkali berubah-ubah. Hal ini bisa dimaklumi karena fenomena tentang perempuan begitu dinamis.

Dalam pengertian komunitas masyarakat di pedesaan atau menurut peneliti tradisional, perempuan tidak dapat dianggap sebagai golongan yang seragam dalam artian memiliki ciri-ciri, kebutuhan, dan persoalan yang sama. Perempuan perlu juga ditelaah dalam berbagai kelompok atau golongan yang berbeda-beda. Pengertian yang seperti ini didukung oleh betapa banyaknya faktor yang mendukung perbedaan tersebut. Sumber-sumber produksi, pen-

didikan, dan pengaruh lingkungan di seputar lingkup interaksi, yang tentunya akan amat menentukan perbedaan tersebut.

Perempuan kepulauan (masyarakat pesisir) yang meninggalkan keluarganya untuk bekerja ke luar negeri, yang merupakan salah satu golongan masyarakat yang secara 'sengaja' dijadikan subjek dalam penelitian ini, merupakan sebagian kecil dari kelompok-kelompok perempuan lainnya. Perempuan kepulauan yang meninggalkan keluarganya bekerja ke luar negeri ini diidentikkan sebagai perempuan yang mandiri, yang dalam interaksi kesehariannya dilekatkan dengan berbagai peran yang khas. Sebagai bagian dari komunitas masyarakat pesisir, dia memiliki peran sebagai istri, ibu, dan juga pekerja (pencari nafkah keluarga). Dalam artian dia juga merupakan bagian kecil 'organ' di dalam 'tubuh' masyarakat. Oleh karenanya, dalam peran dia juga merambah dataran domestik dan publik sekaligus.

Memahami tentang siapa mereka dan bagaimana aspek sepaak terjangnya dalam masyarakat, terasa lebih bijaksana jika sebelumnya dirunut keberadaannya melalui keluarga inti atau keluarga *batih*. Secara universal, keluarga inti memiliki fungsi yang melibatkan individu-individu dalam kehidupan sosial ekonomi rumah tangga. Fungsi-fungsi tersebut adalah memberikan keamanan bagi individu dan bantuan hidup dari sesama, mengurus pengasuhan dan pendidikan anak-anak, menjalankan ekonomi rumah tangga sebagai satu kesatuan, dan melakukan usaha-usaha yang produktif.

Kemandirian perempuan kepulauan Kabupaten Sumenep yang meninggalkan keluarganya untuk

bekerja ke luar negeri secara sosial dan ekonomi, nampak dari posisinya yang menempati dua ranah dalam memaknai kegiatan bekerja yaitu bekerja dalam rumah tangga (domestik) dan bekerja dalam suatu pekerjaan yang menghasilkan pendapatan (publik).

Data yang didapatkan dari Disnakertrans melalui BPS Kabupaten Sumenep tahun 2009, keberangkatan mereka ke luar negeri adalah sebanyak 501 orang, yang mayoritas adalah laki-laki. Pembagiannya adalah Kepulauan Arjasa sebanyak 271 orang, Kanganayan sebanyak 46 orang, Sapeken sebanyak 7 orang, dan Raas sebanyak 1 orang.¹⁰ Namun, data ini adalah data yang legal. Padahal dari hasil observasi dan survey peneliti didapat bahwa jumlah para TKI dari kepulauan Kabupaten Sumenep sangat banyak, kalau tidak mau disebut hampir semua keluarga yang ada di kepulauan Kabupaten Sumenep pasti ada salah satu anggota keluarganya yang menjadi TKI, terutama di Kecamatan Arjasa Sumenep, sehingga peneliti memutuskan untuk membuat Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS), yakni koperasi syari'ah pengelolaan dana remitan berpola *grameen bank* di kepulauan Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, mayoritas para TKI kepulauan Kabupaten Sumenep adalah ilegal.

Sebagai seorang perempuan (yang telah menikah), maka dia memiliki peran dalam keluarga inti sebagai istri, seorang ibu dan sebagai pengurus rumah tangganya. Mereka menyadari sepenuhnya jika tugas utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga. Mereka meng-

hayati betul peran ini dan berusaha untuk menjalaninya dengan sangat baik. Karena ketika mereka dianggap gagal dalam mengurus rumah tangganya, selain akan dicemooh oleh suaminya dan keluarganya juga akan disingkirkan dari keluarganya sendiri. Gambaran tentang keadaan ini dapat disimak dari penuturan Saudah, penjual ikan:

"Mon daddhi bebhinek reya....ye ngabdi ka lake arowa se paleng penting. Mare jareya ngurus anak. Bebhinek kan mara jeriye lako utamana. Kalakoan laennah dagghik bile kalakoan roma mare" (Peran perempuan yang paling penting adalah mengabdikan kepada suaminya. Kemudian mengurus anak. Itulah peran utama perempuan. Aktivitas lainnya bisa dilakukan apabila urusan rumah tangga selesai).¹¹

Pada kesempatan lain, ada seorang istri yang mengungkapkan pendapat yang hampir sama. Menurut Ibu Siti¹²:

"se ngurus anak ben lake iye kodhu bebhinek. Sengko' mara jeriye keya, iye kan lek. Polana lake lakar kodhu alako e luar bengko. Mon sengko' mare alakone kalakoan bengko buru alako e luar" (Yang mengurus anak dan suami adalah istri. Saya juga begitu, bukan? Apabila urusan rumah selesai, saya baru bisa beraktivitas lain di luar rumah).

Pandangan-pandangan seperti ini semakin mengukuhkan bahwa istri-istri di kepulauan Kabupaten Sumenep

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, *Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2012*, (Sumenep: BPS, 2013), hlm. 36-40

¹¹ Wawancara dengan Saudah, penjual ikan, tanggal 02 Agustus 2012.

¹² Wawancara dengan Ibu Siti, ibu rumah tangga dan buruh rumput laut, tanggal 4 Agustus 2012

sangat memahami perannya sebagai ibu rumah tangga. Dalam artian mereka merasa memiliki tanggung jawab atas “ketertiban” rumah tangga dan isinya. Realitas inilah yang sangat bertentangan dengan beberapa dialektika tentang posisi perempuan yang sering kali diperbincangkan oleh sebagian kecil komunitas di perkotaan, akademisi, dan praktisi perempuan yang umumnya merasa belum terlalu puas dengan peran yang sedemikian dan sering menuntut untuk memperoleh hak yang sama sebagai individu yang bebas mengembangkan dan mewujudkan kepribadiannya serta merasa tidak perlu untuk terlalu tenggelam atau membatasi diri dalam mengabdikan dirinya terhadap suami dan anak-anaknya karena bisa dirawat oleh pembantu dan perawatnya. Sedangkan para istri di kepulauan Kabupaten Sumenep beranggapan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan merupakan bagian dari kewajiban dan rasa kecintaan mereka terhadap keluarganya, sehingga tidak pernah berpikiran untuk mendapatkan upah. Persepsi inilah yang kemudian dikuatkan oleh Arief Budiman,¹³ bahwa pekerjaan istri tidak akan mendapatkan nilai tukar walaupun pekerjaannya itu jelas sangat bermanfaat.

Sementara itu, istri-istri yang memiliki anak, maka secara otomatis berperan sebagai ibu. Sebagai seorang ibu, dia merasa memiliki kewajiban untuk merawat anaknya, menjaga kesehatannya dan memperhatikan segala kebutuhannya. Istri-istri ini menyadari betul perannya tersebut karena mereka adalah yang memiliki waktu dan kesempatan yang lebih banyak untuk memerhatikan keadaan anak-anaknya,

dikarenakan suami-suami mereka sibuk bekerja untuk mencari nafkah keluarganya sebagai nelayan, sehingga segala kebutuhan keluarganya diurus semuanya oleh para istri mereka sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah bagi para istri, sehingga mereka akan membiarkan suami-suami mereka untuk tidak mepedulikan keluarganya karena takut para suaminya marah ketika harus disibukkan lagi dengan persoalan keluarganya padahal mereka sudah sangat sibuk dengan mencari kerja. Bahkan ketika para suami mereka tidak bekerja, maka para istri akan segera mengutusny mengenai sebab musabab suaminya tidak ikut bekerja. Jika ternyata karena sakit dan lain sebagainya, para istri akan memakluminya. Namun, jika ternyata karena mereka malas atau takut berpisah dengan keluarganya, maka sang istri akan memasang muka masam kepada suami-suami mereka. Kejadian ini sempat terekam sendiri oleh peneliti ketika mencoba untuk menggali data di salah satu keluarga yang suaminya masih ada di kepulauan Kabupaten Sumenep tepatnya di Pulau Arjasa. Saat itu suami tersebut sedang dihubungi oleh keluarganya yang bekerja di luar negeri (Malaysia) untuk bekerja di sana dikarenakan di tempat kerjanya sedang membutuhkan tenaga kerja baru. Padahal di pulau Arjasa dia hanya bekerja sebagai nelayan yang menurut istrinya sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Istri yang sedang memberikan informasi tersebut kemudian memasang muka cemberut dan berusaha untuk membujuk suaminya supaya mau bekerja ke luar negeri dan mengiyakan ajakan dari keluarganya yang ada di Malaysia, dengan mengatakan bahwa suaminya

¹³ Budiman, *Pembagian Kerja*, hlm. 21

bersedia untuk bekerja di sana.¹⁴ Namun yang terjadi malah istrinya yang berangkat menjadi TKW di Malaysia.

Motivasi mereka bekerja di ranah publik menjadi TKW kebanyakan adalah untuk menambah penghasilan keluarganya. Para istri beranggapan bahwa mereka memiliki kewajiban melakukan ini terutama jika kebutuhan rumah tangganya sangat banyak sementara penghasilan suaminya sebagai nelayan tidak dapat dipastikan berapa.

Dengan demikian, istri ikut berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan di sinilah salah satu letak kemandirian para istri kepulauan Kabupaten Sumenep yang meninggalkan para suaminya untuk bekerja ke luar negeri. Dalam tiga puluh rumah tangga keluarga yang istrinya bekerja ke luar negeri yang dijadikan sampel oleh peneliti terlihat jelas bahwa adanya dampak kesejahteraan yang semakin meningkat dalam rumah tangganya ketika para istri bekerja juga, meskipun kesejahteraan itu terlihat dari rumahnya. Namun demikian, mereka secara umum menganggap semakin buruk dan tetap kondisi perekonomian keluarganya. Hal ini terlihat dalam tabel I tentang perubahan kesejahteraan keluarga yang bekerja ke luar negeri setelah istri bekerja.

Tabel I
Perubahan Kesejahteraan Hidup Keluarga TKI

| Perubahan Kesejahteraan Hidup | Jumlah Keluarga Yang Bekerja Ke Luar Negeri | Persentase |
|-------------------------------|---|------------|
| Memburuk | 10 | 33,3% |
| Tetap | 8 | 26,7% |
| Membaik | 12 | 40% |

Sumber: Data Primer, Kuesioner 2012

¹⁴ Wawancara dengan Maryam, tanggal 20 Juni 2012.

Motivasi kedua adalah untuk mengurangi ketergantungan kepada suami. Beberapa istri di kepulauan Kabupaten Sumenep yang meninggalkan suaminya bekerja ke luar negeri menjelaskan bahwa pengeluaran rumah tangganya tidak hanya untuk makan dan kebutuhan primer lainnya, tetapi juga meliputi kebutuhan untuk urusan kemasyarakatan, seperti perkawinan, melayat, dan lain sebagainya. Untuk itulah para istri bekerja. Motivasi ketiga adalah untuk mengisi waktu luang dan menghindari kebosanan.

Pola Pengelolaan Remitan melalui Grameen Bank: Studi terhadap Koperasi Syari'ah Perempuan 'Bina Mandiri' di Kedungsalam Donomulyo Malang

Penggunaan remitan tidak diatur sama sekali dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah migran, karena hal itu dianggap sebagai wilayah pribadi. Dalam peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya, pembagian harta ketika perceraian terjadi atau peraturan mengenai waris. Demikian pula *mores* maupun *folkways* yang berkembang di daerah tersebut.¹⁵

Remitan merupakan produk yang dihasilkan oleh migran yang merupakan *reward* yang sangat dinantikan dan diharapkan oleh keluarga migran di daerah asal. Akan tetapi, sesungguhnya remitan tidak hanya dinanti oleh keluarga migran tetapi secara tidak langsung hasil migran ini bermanfaat juga untuk daerah asal dan bahkan negara Indonesia. Dengan demikian,

¹⁵ Hilmy, et.al, "Akses dan Kontrol pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)", (Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan: Dian Mutiara Crisis Centre, 2008)

remitan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan dari suatu proses migrasi yang dikirim ke daerah asal baik dalam bentuk materiil, seperti barang, uang, maupun dalam bentuk yang immateril seperti peningkatan kualitas ketrampilan dan ide-ide pembangunan yang bermanfaat bagi daerah asal migran.

Lastri, salah seorang informan menyebutkan bahwa untuk bisa bekerja di Hongkong, dia harus menghadapi suami dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Dia menyadari adanya nilai-nilai sosial yang menyebutkan bahwa sudah seharusnya istri berada di samping suaminya dan mengurus pekerjaan domestik serta menjaga anak-anaknya. Meskipun pada awalnya dilarang oleh orang tua dan suami untuk bekerja di Hongkong, tetapi Lastri selalu mendesak. Dia bahkan menggunakan alasan untuk mengubah perekonomian keluarga menjadi argumentasi utamanya agar orang tua dan suaminya memberikan izin. Strategi ini ternyata berhasil. Hal yang sama juga dilakukan oleh beberapa TKW lainnya. Alasan ekonomi menjadi dalih yang sudah populer di kalangan TKW agar bisa mewujudkan keinginan-nya bekerja di luar negeri. Beberapa informan mengaku belajar dari pengalamannya mantan TKW lainnya perihal penggunaan alasan ekonomi sebagai strategi mewujudkan insiatifnya.¹⁶

Juwariyah, sekembalinya dari bekerja di Hongkong, bahkan sudah mulai berani mengungkapkan usulannya terkait dengan kepentingan keluarga seperti membangun rumah dan mengatur pola asuh anak. Juwariyah mengaku jika bermusyawarah tentang

hal ini bersama orang tua dan suaminya, dia sudah mulai bisa mendominasi pembicaraan. Bahkan dia sudah bisa meyakinkan suaminya bahwa pendapatnya benar. Bagi Juwariyah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rasional dan bisa diterima oleh suami, ketimbang berpegang pada nilai-nilai irasional, adalah strategi agar dia bisa mengambil keputusan pada ranah-ranah tertentu di lingkungan keluarga.¹⁷

Beberapa TKW lain juga memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Juwariyah. Ernawati, mantan TKW, bahkan sudah mempunyai kuasa untuk mengelola sendiri uang hasil jerih payah bekerja selama di Hongkong. Dalam kehidupan rumah tangga, Ernawati juga dipercaya oleh suaminya untuk mengambil keputusan dalam hal pengasuhan anak. Mantan TKW memang mengambil strategi dengan cara menciptakan pola-pola pengambilan keputusan bersama dalam rumah tangga. TKW yang sudah menikah biasanya berkompromi dengan suami untuk berbagi peran dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, posisi perempuan masih lebih banyak memegang pengambilan keputusan untuk hal-hal yang sifatnya domestik, seperti pengasuhan anak, pembelian keperluan bahan rumah tangga, menata rumah, dan sebagainya.¹⁸

Hal menarik dialami Maisiah. Maisiah adalah seorang perempuan yang menjadi korban selingkuh suami saat dia ditinggalkan bekerja selama beberapa tahun. Dalam menghadapi relasi dalam pernikahan, di mana suami mempunyai kekuatan untuk melakukan hubungan seksual selain dengan istri, Maisiah

¹⁷ Wawancara dengan Juwariyah, tanggal 10 April 2012.

¹⁸ Wawancara dengan Ernawati, tanggal 12 April 2012.

¹⁶ Ibid.

berani menggugat cerai suaminya. Menurut Maisiah, hal tersebut dilakukan agar dia tidak ditindas dan disakiti oleh suaminya. Maisiah mengungkapkan bahwa dengan bercerai, suaminya tidak akan bisa menyakiti, menindas, dan merampas hak-haknya. Tindakan perceraian yang dilakukan Maisiah membawa hasil. Saat ini, Maisiah mengaku bahwa mereka telah rukuk, dan dia memiliki kekuatan setara dengan suaminya. Saat ini, suami Maisiah sangat menghormati hak-haknya, terutama haknya sebagai istri.¹⁹

TKW memang mempunyai inisiatif agar mereka bisa memperoleh, mengakses, dan mengontrol hak-haknya. Bekerja ke luar negeri merupakan inisiatif perempuan di desa Kedungsalam, meskipun beberapa perempuan memang mengungkapkan bahwa inisiatif ini muncul setelah melihat kesuksesan kerabat, tetangga atau teman yang sudah terlebih dahulu pergi menjadi TKW.

TKW asal desa Kedungsalam yang bekerja di Hongkong memang mau tidak mau harus berhadapan dengan pemotongan gaji. Akibat pemotongan gaji ini adalah tidak diterimanya sejumlah uang upah pekerjaan mereka. Belum ada perlawanan yang berarti yang dilakukan oleh kebanyakan perempuan di desa Kedungsalam perihal ini. Hampir semua mantan TKW yang menjadi informan, menganggap bahwa pemotongan gaji masih dianggap sebagai sebuah kewajiban pembayaran sebagai konsekuensi pembiayaan pemberangkatan mereka dari desa ke Hongkong.

Inisiatif yang terlihat atas keadaan ini justru membuat beberapa TKW

melakukan kerja lembur atau bekerja di dua majikan guna tetap memperoleh upah yang memadai. Hal ini, misalnya, dilakukan Yunestutik. Dia menguraikan bahwa dirinya bekerja pada dua majikan, yaitu majikan sesuai kontrak kerja dan majikan lain yang merupakan saudara majikan aslinya. Dengan majikan asli, Yunestutik melakukan kerja *full time*, sementara dengan majikan lain dia bekerja *part time*. Baginya, ini adalah strategi supaya dia tetap bisa memperoleh penghasilan atau uang yang merupakan haknya.²⁰ Beberapa TKW lain bahkan melakukan strategi kerja lembur di hari libur untuk tetap memperoleh penghasilan. Sebuah ironi, bahwa beberapa TKW, tanpa disadarinya, melakukan tindakan yang sama saja dengan mengeksploitasi diri guna memperoleh penghasilan.

Beberapa TKW yang memiliki hari libur mengungkapkan bahwa biasanya mereka menghabiskan waktu liburan mereka di sebuah taman, yaitu di Victoria Park. Pada kesempatan ini, mereka bertemu, bercerita, dan saling bertukar informasi dengan sesama pekerja dari Indonesia. Juwariyah adalah salah seorang mantan TKW yang pernah berinisiatif mengumpulkan teman-temannya dalam sebuah wadah kegiatan pengajian atau tahlilan. Juwariyah bercerita bahwa pada saat di Hongkong, dia berhasil mengumpulkan 50 orang sesama TKW yang berasal dari Desa Kedungsalam untuk mengadakan tahlilan setiap minggunya di taman Victoria Park. Pada awalnya, pembentukan kelompok tahlilan ini ditujukan untuk menggalang solidaritas sesama buruh migran asal desanya.

¹⁹ Wawancara dengan Maisiah, tanggal 12 April 2012.

²⁰ Wawancara dengan Yunestutik, tanggal 20 April 2012

Pada awalnya, tahlilan memang dilakukan untuk mendoakan seorang anggota keluarga TKW yang meninggal. Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin setelah banyak TKW lain yang ikut. Dalam perkembangannya, kelompok tahlilan ini tidak hanya melakukan doa-doa semata. Lebih dari itu, mereka mulai melakukan kegiatan menabung (penyimpanan uang) dan ruang untuk saling berkomunikasi. Menurut penuturan Juwariyah, sampai dengan saat ini, meskipun dirinya sudah berada di Indonesia, kelompok tersebut masih terbentuk.

Menurutnya, berkomunikasi dengan sesama TKW pada hari libur merupakan strategi mereka untuk keluar dari tekanan rutinitas pekerjaan. Mulai hari Senin sampai dengan Sabtu, biasanya TKW disibukkan oleh jadwal pekerjaan rumah tangga yang ketat. Tidak ada waktu istirahat, apalagi bagi mereka yang bekerja mulai pagi sampai larut malam.

Keberadaan Victoria Park menjadi ruang mereka untuk mengeluhkan kelelahan dengan sesama rekan TKW, bersenang-senang bersama dengan sesama teman dari Indonesia secara umum, dan dari desa Kedungsalam secara khusus, memasak bersama makanan khas Indonesia, dan memunculkan perasaan kolektif senasib dan sepenanggungan. Beberapa mantan TKW bahkan mengungkapkan hari libur di Victoria Park menjadi ajang yang selalu dinanti-nanti. Tidak jarang ada yang memanfaatkan hari libur ini untuk menjalin hubungan dengan pacar atau kekasihnya.²¹

Beberapa mantan TKW yang menjadi informan juga mengungkapkan bahwa pada saat hari libur tersebut, akan dapat dilihat kelompok-kelompok TKW Indonesia. Kelompok-kelompok ini berkumpul tergantung kepentingannya. Bagi TKW yang menjadi informan, berkumpul pada hari minggu adalah strategi untuk istirahat dari kesibukan, untuk menghilangkan kepenatan dengan majikan, untuk bisa bergaul dengan banyak orang, untuk bisa berkomunikasi dan saling tukar informasi, dan sebagainya.²²

Saat kembali ke kampung halaman di desa Kedungsalam, TKW kembali harus menghadapi situasi sosial budaya masyarakat desa yang jauh berbeda dengan masyarakat kota besar seperti Hongkong. Salah satu hak TKW yang perlu mendapatkan perhatian adalah akses dan kontrol atas pengelolaan penghasilannya (remitan).

Saat kembali berada di desa, Juwariyah mempunyai inisiatif untuk mengatasnamakan semua hasil yang diperoleh melalui bekerja di Hongkong dengan namanya. Sertifikat atas tanah yang dia beli menggunakan uang pribadinya, di atasnamakan nama Juwariyah. Begitu pula dengan barang *furniture* yang ada di rumahnya dibeli Juwariyah menggunakan uang gajinya. Rumah yang saat ini ditinggali juga merupakan hasil jerih payah Juwariyah. Dia bercerita:

“Hasil (gaji) saya buat beli tanah di dekat tempat orang tua, sudah disertifikat, itu atas nama saya. Kalau rumah ini tanahnya punya suami, belum ada sertifikatnya.

²¹ Hilmy, et.al, " Akses dan Kontrol pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)", (Laporan Penelitian

Solidaritas Perempuan: Dian Mutiara Crisis Centre, 2008)

²²Ibid.

Barang-barang di rumah juga saya yang beli sendiri setelah datang dari Hongkong. Seperti kursi ini juga *mbak*, saya beli sendiri waktu masih di Hongkong. Jadi saya lihat gambar perabotnya dari sana (Hongkong), kemudian saya transfer uangnya ke toko, dan barangnya langsung dikirim oleh penjualnya dari toko ke rumah. Saat membangun rumah ini juga *gitu mbak*. Saya langsung transfer uang ke toko bangunan di sini (di desa Kedungsalam) dan toko bangunan yang kemudian mengirim bahan bangunan ke rumah sini".²³

Selain pengalaman Juwariyah, juga ada pengalaman Ernawati. Ernawati saat ini memiliki 2 sertifikat tanah. Atas inisiatifnya sendiri, kedua sertifikat itu diatasnamakan dirinya. Inisiatif ini merupakan strategi yang dilakukan Ernawati agar hak kepemilikan harta hasilnya bekerja di Hongkong tidak jatuh ke tangan suami. Pengalaman dikhianati suami berselingkuh saat ia masih di Hongkong membuatnya tergerak untuk mengamankan hasil jerih payah bekerjanya di Hongkong.²⁴ Strategi membuat sertifikat atas namanya dilakukan agar dia tidak dipermainkan atau dieksploitasi oleh laki-laki. Strategi ini dilakukan secara sadar oleh Ernawati, meskipun suaminya masih dianggap berperan sebagai kepala keluarga, dia tidak tinggal diam untuk mengantisipasi pengelolaan penghasilannya.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan sejumlah informan mantan TKW di Desa Kedungsalam, terlihat bahwa para mantan TKW di desa ini memang sudah memiliki kesadaran untuk berkumpul bersama, membentuk suatu kelompok maupun organisasi guna menuntut perolehan atas hak-hak mereka, meskipun awalnya berasal dari kumpulan tahlilan para ibu-ibu. Namun para mantan TKW tersebut menyadari tentang hak dan kebutuhan mereka sebagai perempuan dan warga masyarakat. Keinginan untuk berkumpul memang sudah mulai ada sejak beberapa tahun terakhir. Kelompok ini didasarkan pada kebutuhan perempuan-perempuan yang ada di desa. Suwantin menjelaskan tentang kelompok tahlilan atau pengajian yang sudah terbentuk di desa Kedungsalam:

"Dulu ibu-ibu di sini ingin ada yang namanya pengajian atau *ya* itu tahlilan. Terus kita bareng-bareng setuju membuat kelompok tahlilan itu."²⁵

Pernyataan serupa disebutkan oleh Siti, seorang tokoh agama perempuan. Dia mengungkapkan bahwa kelompok tahlilan di desa Kedungsalam didirikan sejak tahun 2002. Saat itu, dirinya diminta untuk memimpin tahlil tersebut. Secara bersama-sama, perempuan memilih Ibu Siti untuk menjadi pemimpin tahlil ini. Alasannya, karena Ibu Siti memiliki pengetahuan agama Islam yang lumayan baik.²⁶

Kegiatan dalam kelompok tahlilan juga semakin berkembang. Kegiatan ini tidak lagi hanya sebatas pada kegiatan pengajian dan pemahaman ajaran agama

²³ Wawancara dengan Juwariyah, tanggal 20 April 2012.

²⁴ Ummy Hilmy, "Poligami di Kalangan Buruh Perempuan (Studi Pada Buruh Industri Dan Buruh Migran)" dalam *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005).

²⁵ Wawancara dengan Suwantin, tanggal 20 April 2012.

²⁶ Dikutip dari Hilmy, et.al, "Akses dan Kontrol".

Islam atau mendoakan arwah-arwah keluarga yang sudah meninggal. Dalam kelompok tahlilan juga sudah mulai dilakukan arisan, yang menurut perempuan di desa Kedungsalam merupakan bagian dari sarana belajar menabung. Mantan TKW juga bertutur bahwa kelompok tahlilan di desanya sudah menjadi sarana saling bertukar informasi tentang berbagai hal.

Tokoh agama Islam di Desa Kedungsalam memang memiliki minat besar untuk mengembangkan kelompok-kelompok perempuan. Kegiatannya berisikan nilai-nilai keagamaan. Satiyah, seorang tokoh agama dan pemimpin tahlil akbar menjelaskan:

"Kalau bisa mau membuat kumpulan perempuan. Kumpulan itu sebagai sarana peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan aktifitasnya yang kuat terhadap agamanya. Harus bisa menghilangkan klenik-klenik Jawa yang bertentangan nilai agama."²⁷

Namun, untuk mengorganisasikan sebuah kelompok perempuan di Desa Kedungsalam memang tidak mudah. Hal ini pernah dialami Juwariyah. Juwariyah, mantan pemimpin kelompok tahlilan TKW di Victoria Park, mengatakan bahwa sesungguhnya dia memiliki keinginan membentuk kelompok yang sama, namun hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Dia berkata:

"Dulu itu maksud saya mau diadakan tahlilan seperti waktu saya memimpin kelompok di Hongkong. Tadinya, dulu itu mau dibuat setiap hari Kamis, Sabtu, atau Minggu dan *nggak* ada yang setuju. Maksud saya, seminggu

sekali ada pertemuan ibu-ibu di sini, tapi *gak* jadi juga."²⁸

Berbicara perihal engganannya perempuan desa Kedungsalam untuk membuat kegiatan bersama selain pengajian memang menarik. Dinda (bukan nama sebenarnya), seorang aktivis sebuah organisasi buruh migran cabang Malang menyebutkan,

"Di Donomulyo sulit mengorganisasi perempuan di sana, selain orangnya curiga dengan kita, mereka pikir kita (aktivis SBMI DPC Malang) mau berbuat macam-macam yang tidak benar. Birokrasinya juga sulit. Donomulyo sudah banyak masalah. Sudah begitu, lokasinya jauh. Apalagi daerah Ngliyep, Desa Kedungsalam."²⁹

Kesulitan membangun kelompok perempuan juga diakui oleh Sumiyati, istri kepada desa. Dia mengungkapkan bahwa perempuan di desa jarang yang mau datang jika diundang dalam pertemuan. Sumiyati menjelaskan:

"Perempuan di sini kalau diundang untuk membentuk kumpulan sulit. Mereka mau datang mungkin jika diundang satu-satu."³⁰

Berikut pemetaan aktor-aktor yang menjadi *agent of change* bagi pemberdayaan TKW di desa Kedungsalam antara lain, yaitu:

1. Tenaga Kerja Wanita (TKW)
 - a. Juwariyah, TKW ini memiliki sifat yang proaktif. Pengajian di taman Victoria Hongkong (50 orang anggota) dan keberadaan tahlil kecil serta

²⁸ Wawancara dengan Juwariyah, tanggal 20 April 2012.

²⁹ Wawancara dengan Dinda (bukan nama sebenarnya), tanggal 8 April 2012.

³⁰ Wawancara dengan Sumiyati, tanggal 9 April 2012.

²⁷ Wawancara dengan Satiyah, tanggal 20 April 2012.

diba' adalah bukti keberhasilannya mengorganisasi sesama perempuan.

- b. Yuyun. TKW ini memang tergolong pendiam. Namun dia menjaga hubungan baik dengan TKW lainnya, sehingga dia cukup dihormati oleh sesama TKW. Saudaranya juga banyak yang menjadi TKW di Hongkong dan saudara-saudaranya tersebut tersebar di beberapa titik wilayah di desa Kedungsalam. Bukti nyata kesuksesan TKW ini adalah mengorganisasi perempuan dalam pelaksanaan *focused group discussion* (FGD) tentang hak perempuan dan proses migrasi.
2. Tokoh Agama
 - a. Satiyah, tokoh ini suaminya sangat dihormati di desa. Dia sendiri adalah pemimpin tahlil kecil di wilayahnya dan sekaligus koordinator tahlil/pengajian akbar.
 - b. Juwariyah, tokoh ini sebenarnya juga TKW, namun karena dia juga mengajar mengaji tiap hari dan menjadi pimpinan tahlil kecil di Ngliyep, maka sudah sepantasnya jika dia tergolong pula pada tokoh agama.
 - c. Tukini, tokoh ini juga TKW, namun dia lebih diakui posisinya sebagai pimpinan tahlil kecil di Krajan.
3. Tokoh Masyarakat (Sumiyati, Bu Lurah), tokoh ini adalah tokoh yang dianggap memiliki penghargaan status sosial akibat kekuasaan suaminya, sebagai Kepala Desa. Sehingga dia memiliki daya

paksa untuk mengorganisasi massa.

Mereka itulah yang menjadi *agent of change* yang memanfaatkan arisan tahlil bukan sekadar rutinitas pengajian. Namun, bisa lebih bermanfaat untuk menciptakan pola pengelolaan hasil dari upah yang mereka dapat sebagai TKW di Hongkong. Mulai tahun 2009 rencana tersebut disepakati oleh semua anggota arisan tahlil untuk membuat koperasi syari'ah perempuan dengan nama "Bina Mandiri", sebagai upaya pengelolaan dana remitan dari para mantan TKW desa Kedungsalam, yang diketuai oleh Latiyah, dengan jumlah anggota 22 orang.

Koperasi Syari'ah Perempuan 'Bina Mandiri': Pengelola Dana Remitan Berpola Grameen Bank

Ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh sekelompok orang untuk mendirikan koperasi. Ada persyaratan umum dan ada juga persyaratan khusus tentang bentuk koperasi tersebut, seperti apakah koperasi simpan pinjam, unit jasa keuangan syari'ah, unit simpan pinjam, dan koperasi jasa keuangan syariah.³¹

Berawal dari perkumpulan tahlilan, para ibu dan mantan TKW berupaya untuk membuat koperasi berpola syari'ah. Proses pendirian koperasi sebenarnya dimulai sejak lama, yaitu sejak tahun 2002. Namun baru tahun 2009 perkumpulan tahlilan ini betul-betul memroses pendirian koperasi syari'ah perempuan dengan nama 'Bina Mandiri. Ketuanya adalah Latiyah dan diikuti oleh 22 anggota dengan alamat Jl. Raya Pantai Ngliyep Rt 20 Rw 4 Desa

³¹ Kementrian Koperasi dan UKM RI, "Pedoman Pendirian Koperasi" (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2011)

Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. Ia disahkan oleh Itta Andrijani, SH, dan baru pada tanggal 30 Maret 2010 koperasi syari'ah perempuan 'Bina Mandiri' ini mendapatkan akta pendirian dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Malang dengan Nomor 183/BH/XVI.14/III/2010, dengan bentuk koperasi simpan pinjam (KSP) syari'ah.

Saat ini koperasi syari'ah perempuan 'Bina Mandiri' sudah memiliki 47 anggota dengan simpanan pokok sebesar Rp 50.000-. dan simpanan wajib minimal sebesar Rp 10.000-./bulan. Dari sinilah kemudian koperasi itu berkembang dan memiliki berbagai bentuk usaha lain, di antaranya adalah usaha kripik pisang, kripik emping, dan penanaman pohon sengan, serta rental pengetikan komputer, dan warnet, dengan bantuan dari Windows pada tahun 2011.

Setiap anggota diperbolehkan untuk meminjam dana koperasi sebesar Rp 1.000.000 – 2.000.000 untuk kebutuhan usaha keluarga dan kepentingan keluarga. Dari peminjaman ini, setiap anggota diwajibkan untuk membayar per-minggu sebesar kemampuan mereka. Dari hasil pembayaran ini, koperasi mendapatkan keuntungan seikhlasnya para anggota yang meminjamnya. Bahkan pola seperti ini lebih baik dan berkeadilan ketimbang pola *grameen bank* di mana polanya adalah bank ini dimiliki oleh peminjam miskin dari *grameen bank* tersebut, yang kebanyakan adalah perempuan. Sekitar 94% dimiliki oleh peminjam, sedangkan sisa 6% dimiliki oleh Pemerintahan Bangladesh.³² Bahkan

setiap akhir tahunnya para anggota koperasi syari'ah perempuan 'Bina Mandiri' bisa mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 150.000 secara merata, dengan tidak melihat struktur kepengurusan keanggotaannya. Dalam artian baik yang duduk sebagai pimpinan ataupun bawahan mendapatkan SHU yang sama.

Pola ini sesuai dengan bentuk *Grameen Bank*, di mana metode yang digunakan *grameen bank* ini berupa *group lending*, *group sanction* atau *collateral*. Berbeda dengan sistem dan prinsip bank konvensional, cara kerja *Grameen Bank* adalah memberikan kredit kepada orang miskin, yang sebagian besar tidak berpenghasilan tetap. *Grameen Bank* merancang kredit mikro berbasis kepercayaan bukan kontrak legal. Konkritnya, peminjam diminta membuat kelompok yang terdiri dari lima orang dengan seorang pemimpin. Pinjaman diberikan secara berurutan dengan catatan orang kedua baru bisa meminjam setelah pinjaman orang pertama dikembalikan. Pembayaran pinjaman yang dilakukan *Grameen Bank* diberikan kepada sebuah kelompok miskin, dan pembayarannya juga melalui kelompok itu. Jika terdapat nasabah yang tidak mampu membayar, maka teman dalam satu kelompoknya harus membantu supaya orang tersebut mampu membayar. Selain itu, kelompok peminjam dituntut membuat pelbagai agenda sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Ada kombinasi antara modal uang dan modal sosial. Dengan menerapkan modal sosial ini, pengembalian utang kepada *Grameen Bank* bisa mencapai 99%.³³

³² Zain, Penerapan Model *Grameen Bank* pada Pengelolaan Dana di Daerah Pedesaan, 2002, www.prasetya.barwijaya.ac.id/mar01.html (diakses tanggal 05 Maret 2012)

³³ Muhammad Yunus, *Expanding Microcredit Outreach the Millennium Development Goal-Some Issues For Attention* (Cittagong, Bangladesh: Packages Corporation Limited, 2003).

Demi keberlanjutan antargenerasi, *Grameen Bank* memfokuskan pinjaman pada perempuan. Ada dua misi dari aksi ini: *pertama*, pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan posisi tawar mereka, baik di ruang domestik maupun publik. *Kedua*, peningkatan kualitas hidup anak. Riset membuktikan, peningkatan ekonomi perempuan berbanding lurus dengan tingkat pendidikan dan kesehatan anak. Pemberdayaan ekonomi perempuan berhubungan langsung dengan turunnya angka kematian bayi dan malnutrisi.³⁴

Hal inilah yang dilakukan oleh para anggota koperasi syari'ah perempuan 'Bina Mandiri', terutama para mantan TKW, di mana penghasilan yang mereka dapatkan dari Hongkong sudah habis, karena dibelikan tanah, perbaikan rumah, kendaraan, dan usaha lainnya. Sehingga hasil dari pembelanjaan tersebut, seperti tanahnya ditanami pisang, pohon sengon, ketela, dan lainnya, maka keuntungan yang didapatnya biasanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka dan sisanya untuk ditabung di koperasi syari'ah perempuan 'Bina Mandiri' atau untuk membayar hutang kepada koperasi tersebut.

Sampai saat ini hampir semua mantan TKW yang berasal dari Desa Kedungsalam sesudah purna jadi TKW bisa dikategorikan sebagai mantan TKW yang mampu mengangkat derajat sosial ekonomi keluarganya. Bahkan mereka sudah bisa memperbaiki kondisi ekonomi desanya melalui sumbangan wajib yang diminta oleh aparat desa. Kemapanan ekonomi dan kemandirian

mantan TKW inilah yang semakin memperkuat basis kesadaran masyarakat Desa Kedungsalam Donomulyo untuk lebih menghargai arti penting ilmu pendidikan melalui pendidikan formal. Sehingga saat ini sangat jarang anak muda Desa Kedungsalam yang sekolahnya hanya sampai tingkat SLTP. Bahkan menurut Pak Misdi, Kepala Desa Kedungsalam, bahwa sudah 60% lebih anak muda di Desa Kedungsalam baik laki-laki maupun perempuan yang melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi, terutama di wilayah Malang.³⁵

Pola keuntungan dan resiko yang seimbang dalam pola simpan pinjam menjadi landasan utama lahirnya koperasi syari'ah perempuan 'Bina Mandiri'. Ia dilandasi oleh rasa kebersamaan dan kepercayaan terhadap masing-masing pengurus dan anggota dari koperasi tersebut. Rasa kebersamaan akibat perilaku ketidakadilan yang dialami mereka ketika menjadi TKW dan kemiskinan serta lemahnya pendidikan menjadi fondasi kekuatan yang luar biasa dalam proses pembentukan dan pengelolaan koperasi syari'ah perempuan 'Bina Mandiri' ini.

Pengelolaan dana remitan untuk dipolakan dengan sistem *Grameen Bank* sebagaimana di koperasi syari'ah perempuan 'Bina Mandiri' memang masih harus berproses panjang, di mana *Grameen Bank* sebenarnya bisa dikategorikan sebagai pola pengembangan sistem perbankan yang mungkin dapat disebut sebagai sistem perbankan kerakyatan, seperti model *Grameen Bank* yang ada di Bangladesh. Sebagaimana dikemukakan

³⁴ Mudrajat Kuncoro, "Grameen Bank & Lembaga Keuangan Mikro", dalam *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 2 Agustus 2008, <http://www.kr.co.id> (diakses tanggal 05 Maret 2012)

³⁵ Wawancara dengan Pak Misdi, tanggal 25 Juli 2012.

oleh Manurung,³⁶ sebagai pengganti kelangkaan agunan yang dialami usaha-usaha ekonomi rakyat, alternatif yang ditawarkan oleh *Grameen Bank* adalah dengan mengorganisasikan para calon debiturnya melalui pembentukan kelompok atau pusat. Selain berfungsi sebagai pengganti agunan, pengorganisasian para debitur *Grameen Bank* juga dimaksudkan untuk: (1) menumbuhkan rasa aman dan rasa percaya diri dalam melakukan prakarsa baru; (2) sebagai wahana utama bagi partisipasi para anggotanya dalam kegiatan proyek; (3) sebagai sumber tekanan terhadap anggotanya agar memenuhi kewajibannya terhadap bank, dan untuk mendorong mereka agar memiliki keberanian dalam meninggalkan sikap-sikap tradisional yang tidak diperlukan, serta untuk mencegah perbuatan anti sosial; (4) melalui pembentukan kelompok, terbuka peluang bagi mereka yang lemah untuk mengubah keadaan mereka menjadi kekuatan kolektif.

Sebagai kelengkapan dari pengembangan modal institusional tersebut, *Grameen Bank* juga menerapkan apa yang disebut sebagai ikrar 16 pasal, yaitu yang ditujukan untuk meningkatkan disiplin, persatuan, kerja keras, kesejahteraan setiap anggota kelompok debitur. Ikrar terhadap 16 pasal itu wajib dilakukan setiap pertemuan pusat (meliputi 5-6 kelompok) yang dilakukan setiap minggu. Bahkan, terkait dengan pengembangan modal intelektual, setiap pusat juga dianjurkan mendirikan sekolah. Model lain yang juga dapat dipertimbangkan sebagai pengejawantahan sistem perbankan kerakyatan adalah

sistem perbankan bagi hasil (Bank Islam). Prinsip utama sistem perbankan bagi hasil adalah pembagian keuntungan dan resiko secara berkeadilan antara debitur, kreditur, dan penabung. Dengan adanya pembagian keuntungan dan resiko yang seimbang tersebut diharapkan muncul rasa tanggung jawab bersama dalam penyaluran kredit dan pengelolaan proyek.³⁷

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1) hampir semua keluarga TKI berasal dari keluarga miskin secara ekonomi; 2) keberangkatan para TKI di Kabupaten Malang banyak dilakukan secara legal dan tujuannya utamanya ke Hongkong; 3) para TKI di kepulauan Sumenep mayoritas ilegal, dengan tujuan Malaysia dan Timur Tengah; 4) pengelolaan dana remitan di Desa Kedungsalam sudah sangat baik dengan dibentuknya koperasi syari'ah perempuan 'Bina Mandiri', dengan pengelolaan berpola *Grameen Bank*; 5) dana remitan di Desa Kedungsalam banyak dilakukan untuk pembelian tanah pertanian, perbaikan rumah, pembelian kendaraan, dan modal usaha, serta untuk simpanan di koperasi syari'ah perempuan 'Bina Mandiri'; 6) para TKI di kepulauan Sumenep dalam mengelola remitan kebanyakan untuk membayar hutang pemberangkatan, kebutuhan harian, dan untuk membangun rumah dengan sangat megah dengan segala fasilitas di dalamnya.

Dari sinilah peneliti akan merekomendasikan beberapa hal, di antaranya:

- a. Perlunya pemahaman para TKI untuk mengelola dana remitannya dengan

³⁶ V. T. Manurung, "Keragaan Kelembagaan Perkreditan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Skala Kecil di Kawasan Indonesia Timur", *FAE* Vol. 16 No. 2 (Desember 1998), hlm. 67-80

³⁷ Yunus, *Expanding Microcredit Outreach*.

baik, bukan untuk merubah gaya hidup dan perilakunya.

- b. Perlunya dinas-dinas terkait, seperti Disnakertrans, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM untuk memberdayakan dan melatih mereka (mantan TKI) supaya berdaya saing secara ekonomi, sosial, budaya, dan religius. Sehingga ketika mereka purna dari TKI masih bisa memberdayakan diri dan keluarganya secara ekonomi menuju stratifikasi sosial yang lebih baik sebelum dia berangkat menjadi TKI.
- c. Perlunya penyadaran akan pentingnya menjadi TKI yang legal, untuk menjaga keamanan dan jaminan bagi mereka.[]

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, *Kabupaten Sumenep dalam Angka 2012*, Sumenep: BPS, 2013
- Budiman, Arief. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1996
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Hilmy, Umami, et al, "Akses dan Kontrol Pada Penghasilan dalam Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang)." *Laporan Penelitian Solidaritas Perempuan*: Dian Mutiara Crisis Centre, 2008
- ."Poligami di Kalangan Buruh Perempuan (Studi Pada Buruh Industri dan Buruh Migran) dalam *Wacana Poligami di Indonesia*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Pedoman Pendirian Koperasi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2011
- Kuncoro, Mudrajat., 'Grameen Bank & Lembaga Keuangan Mikro', dalam *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu, 2 Agustus 2008.
- Manurung, V.T., "Keragaan Kelembagaan Perkreditan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Skala Kecil di Kawasan Indonesia Timur", *FAE*, Vol. 16 No. 2 Desember 1998
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999
- Rahayu, Devi. *Trafficking Buruh Migran*. Sidoarjo: Qithos Digital Press, 2007
- Syafa'at, et al. *Menggagas Kebijakan Pro TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002.
- Yunus, Muhamad. *Expanding Microcredit Outreach the Millen-nium Development Goal-Some Issues For Attention*. Cittagong, Bangladesh: Packages Corporation Limited, 2003.
- Zain, Penerapan Model Grameen Bank pada Pengelolaan Dana di Daerah Pedesaan, www.prasetya.barwijaya.ac.id/mar01.html (diakses tanggal 05 Maret 2012)

